BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan:

Pertama, kegiatan ceramah penyuluhan hukum dengan sasaran yaitu pelajar SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Banjar. Dalam pelaksanaan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini sesuai dengan harapan karena sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip dan metode penyuluhan diantaranya adalah Integrative atau Asosiasi dan metode berdasarkan pendekatan massal atau dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. *Kedua* Kegiatan Temu Sadar Hukum tahun 2016 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan pada 2 (dua) Kabupaten/Kota diwilayah Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum ini sesuai dengan harapan karena memenuhi prinsip-prinsip dan metode penyuluhan diantaranya adalah organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/membentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari keluarga/kekerabatan, kelompok tani dan

perhimpunan dan metode berdasarkan pendekatan kelompok yaitu seperti temu lapangan.

2. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti laptop, proyektor/infocus, handycam/kamera digital, tape recorder, buku-buku, leaflet dan juga kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi untuk kelancaran kegiatan. Dan untuk mengatasi kendala dana tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan peserta kegiatan penyuluhan hukum apakah dari kalangan pelajar, masyarakat umum atau aparatur pemerintah.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan bisa berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk kelancaran kegiatan.
2. Hendaknya pemerintah daerah bisa berkoordinasi untuk kelancaran kegiatan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
3. Hendaknya masyarakat lebih menyadari hukum tentang narkoba dan ikut berperan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.